

Laporan Prioritas Nasional Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur

[illegible]

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: 10,99%	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: - (rasionalisasi anggaran)
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Jumlah Rekomendasi dan Persetujuan lingkungan/ rekomendasi kelayakan operasional yang diberikan: 12 dokumen	Jumlah Rekomendasi dan Persetujuan lingkungan/ rekomendasi kelayakan operasional yang diberikan: 200%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0010	Pembangunan Sumur resapan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 100 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase pelayanan pengujian laboratorium: 100%	Persentase pelayanan pengujian laboratorium: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	100%	100%
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolatan	X.XX.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: 10,99%	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: - (rasionalisasi anggaran)
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawalan: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawalan: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32 %	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: 10,99%	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: - (rasionalisasi anggaran)
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelengkapan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: 10,99%	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA: - (rasionalisasi anggaran)
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelengkapan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuan Hidup	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUUA (TUTUP)	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAJUUA (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 15,47%	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat: 111,37%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 1,32%	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun: 104,5%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian: 100%
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Kewan dan Kesmavet	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64%
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Angka Konsumsi Ikan: 58 Kg/Kapita/Tahun	Angka Konsumsi Ikan: 88,08 Kg/Kapita/Tahun
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 ha
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 ha
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 790.420 ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola: 105,36 ha
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 %
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Angka Konsumsi Ikan: 58 Kg/Kapita/Tahun	Angka Konsumsi Ikan: 88,08 Kg/Kapita/Tahun
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): 3,45%	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing): - 47,64 %

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000 ton	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44 ton
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Angka Konsumsi Ikan: 58 Kg/Kapita/Tahun	Angka Konsumsi Ikan: 88,08 Kg/Kapita/Tahun
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Angka Konsumsi Ikan: 58 Kg/Kapita/Tahun	Angka Konsumsi Ikan: 88,08 Kg/Kapita/Tahun
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase daerah rentan rawan pangan: 24%	Persentase daerah rentan rawan pangan: 271,17%
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase daerah rentan rawan pangan: 24%	Persentase daerah rentan rawan pangan: 271,17%
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase Produsen Pangan Segar Terjamin Keamanan Pangan: 30%	Persentase Produsen Pangan Segar Terjamin Keamanan Pangan: 186,97%
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Persentase Produsen Pangan Segar Terjamin Keamanan Pangan: 30%	Persentase Produsen Pangan Segar Terjamin Keamanan Pangan: 186,97%
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan: 25	Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan: 22,64

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	%	80,93
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- Produksi Padi: 796.154 - Produksi Jagung: 299.593 - Produksi Sorgum: 2.086 - Produksi Kedelai: 1.483 - Produksi Kacang Hijau: 7.655 - Produksi Bawang Merah: 12.820 - Produksi Cabe: 13.783 - Produksi Jeruk: 18.381 - Produksi Mangga: 41.124 - Produksi Kelapa: 73.179,95 - Produksi Kopi: 29.076,20 - Produksi Kakao: 23.177,97 - Produksi Jambu Mete: 59.104,44 - Produksi Cengkeh: 4.551,57 - Produksi Kelor (daun basah): 3.824,54 - Cakupan benih bersertifikat: 100,00 - Cakupan Penggunaan Pupuk: 19,00 - Rasio Ketersediaan Alsintan: 14,20	- Produksi Padi: 125,88 - Produksi Jagung: 138,71 - Produksi Sorgum: 81,71 - Produksi Kedelai: 4,3 - Produksi Kacang Hijau: 39,72 - Produksi Bawang Merah: 72,28 - Produksi Cabe: 72,28 - Produksi Jeruk: 53,98 - Produksi Mangga: 90,91 - Produksi Kelapa: 85,49 - Produksi Kopi: 85,84 - Produksi Kakao: 91,59 - Produksi Jambu Mete: 89,36 - Produksi Cengkeh: 86,83 - Produksi Kelor (daun basah): 39,98 - Cakupan benih bersertifikat: 100,00 - Cakupan Penggunaan Pupuk: 480,37 - Rasio Ketersediaan Alsintan: 44,37

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-Produksi Padi: 796.154 -Produksi Jagung: 299.593 -Produksi Sorgum: 2.086 -Produksi Kedelai: 1.483 -Produksi Kacang Hijau: 7.655 -Produksi Bawang Merah: 12.820 -Produksi Cabe: 13.783 -Produksi Jeruk: 18.381 -Produksi Mangga: 41.124 -Produksi Kelapa: 73.179,95 -Produksi Kopi: 29.076,20 -Produksi Kakao: 23.177,97 -Produksi Jambu Mete: 59.104,44 -Produksi Cengkeh: 4.551,57 -Produksi Kelor (daun basah): 3.824,54 -Cakupan benih bersertifikat: 100,00 -Cakupan Penggunaan Pupuk: 19,00 -Rasio Ketersediaan Alsintan: 14,20	-Produksi Padi: 125,88 -Produksi Jagung: 138,71 -Produksi Sorgum: 81,71 -Produksi Kedelai: 4,3 -Produksi Kacang Hijau: 39,72 -Produksi Bawang Merah: 72,28 -Produksi Cabe: 72,28 -Produksi Jeruk: 53,98 -Produksi Mangga: 90,91 -Produksi Kelapa: 85,49 -Produksi Kopi: 85,84 -Produksi Kakao: 91,59 -Produksi Jambu Mete: 89,36 -Produksi Cengkeh: 86,83 -Produksi Kelor (daun basah): 39,98 -Cakupan benih bersertifikat: 100,00 -Cakupan Penggunaan Pupuk: 480,37 -Rasio Ketersediaan Alsintan: 44,37
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-Produksi Padi: 796.154 -Produksi Jagung: 299.593 -Produksi Sorgum: 2.086 -Produksi Kedelai: 1.483 -Produksi Kacang Hijau: 7.655 -Produksi Bawang Merah: 12.820 -Produksi Cabe: 13.783 -Produksi Jeruk: 18.381 -Produksi Mangga: 41.124 -Produksi Kelapa: 73.179,95 -Produksi Kopi: 29.076,20 -Produksi Kakao: 23.177,97 -Produksi Jambu Mete: 59.104,44 -Produksi Cengkeh: 4.551,57 -Produksi Kelor (daun basah): 3.824,54 -Cakupan benih bersertifikat: 100,00 -Cakupan Penggunaan Pupuk: 19,00 -Rasio Ketersediaan Alsintan: 14,20	-Produksi Padi: 125,88 -Produksi Jagung: 138,71 -Produksi Sorgum: 81,71 -Produksi Kedelai: 4,3 -Produksi Kacang Hijau: 39,72 -Produksi Bawang Merah: 72,28 -Produksi Cabe: 72,28 -Produksi Jeruk: 53,98 -Produksi Mangga: 90,91 -Produksi Kelapa: 85,49 -Produksi Kopi: 85,84 -Produksi Kakao: 91,59 -Produksi Jambu Mete: 89,36 -Produksi Cengkeh: 86,83 -Produksi Kelor (daun basah): 39,98 -Cakupan benih bersertifikat: 100,00 -Cakupan Penggunaan Pupuk: 480,37 -Rasio Ketersediaan Alsintan: 44,37
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-Produksi Padi: 796.154 -Produksi Jagung: 299.593 -Produksi Sorgum: 2.086 -Produksi Kedelai: 1.483 -Produksi Kacang Hijau: 7.655 -Produksi Bawang Merah: 12.820 -Produksi Cabe: 13.783 -Produksi Jeruk: 18.381 -Produksi Mangga: 41.124 -Produksi Kelapa: 73.179,95 -Produksi Kopi: 29.076,20 -Produksi Kakao: 23.177,97 -Produksi Jambu Mete: 59.104,44 -Produksi Cengkeh: 4.551,57 -Produksi Kelor (daun basah): 3.824,54 -Cakupan benih bersertifikat: 100,00 -Cakupan Penggunaan Pupuk: 19,00 -Rasio Ketersediaan Alsintan: 14,20	-Produksi Padi: 125,88 -Produksi Jagung: 138,71 -Produksi Sorgum: 81,71 -Produksi Kedelai: 4,3 -Produksi Kacang Hijau: 39,72 -Produksi Bawang Merah: 72,28 -Produksi Cabe: 72,28 -Produksi Jeruk: 53,98 -Produksi Mangga: 90,91 -Produksi Kelapa: 85,49 -Produksi Kopi: 85,84 -Produksi Kakao: 91,59 -Produksi Jambu Mete: 89,36 -Produksi Cengkeh: 86,83 -Produksi Kelor (daun basah): 39,98 -Cakupan benih bersertifikat: 100,00 -Cakupan Penggunaan Pupuk: 480,37 -Rasio Ketersediaan Alsintan: 44,37
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama): 66,67 Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya): 82,46 Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut): 89 Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula): 96,45	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama): 25,60 Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya): 7,35 Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut): 4,21 Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula): 0,34
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Produksi Perikanan Tangkap: 205.000	Produksi Perikanan Tangkap: 45,44
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Angka Konsumsi Ikan: 58	Angka Konsumsi Ikan: 88,08
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan sesuai ketentuan: 100%	Persentase Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan sesuai ketentuan: 113%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan sesuai ketentuan: 100%	Persentase Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan sesuai ketentuan: 113%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan sesuai ketentuan: 100%	Persentase Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan sesuai ketentuan: 113%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase pemanfaatan data dan system informasi penanaman modal: 95%	Persentase pemanfaatan data dan system informasi penanaman modal: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 10%	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 10%	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 100%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 10%	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 10%	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 10%	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM: 67,86%	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM: 67,86%	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM: 67,86%	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM: 100%
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Persentase Promosi Penanaman Modal: 100%	Persentase Promosi Penanaman Modal: 100%
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 80%	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 125%
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 80%	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 125%
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 80%	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 125%
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 80%	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 125%
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	X.XX.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	N/A	N/A
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	N/A	N/A
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 50 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 11 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 25 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 3	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 78 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 100 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 48 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 100
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 50 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 11 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 25 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 3	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 78 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 100 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 48 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 100
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 50 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 11 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 25 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 3	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 78 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 100 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 48 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 100
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 50 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 11 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 25 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 3	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 78 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 100 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 48 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 100
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 50 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 11 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 25 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 3	Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 78 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan Pendidikan: 100 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 48 Presentasi peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympik: 100
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 250	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 341
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 250	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 341

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 250	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 341
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 250	Proporsi pertambahan wirausaha pemuda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap Tahun: 341
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan dan kwarcab setiap Tahun: 8	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan dan kwarcab setiap Tahun: 112,5
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun: 79,61 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak 0-18 Tahun: 82	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun: 101,14 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak 0-18 Tahun: 102,52
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 82	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 100
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 82	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 100
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 13,5	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 133
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 13,5	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 133

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 13,5	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 133
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 13,5	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 133
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 13,5	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 133
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 13,5	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak: 133
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi: 18	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi: 244
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi: 18	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi: 244
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 82	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 100
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 82	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 100
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 82	Cakupan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK): 100
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar: 105

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar: 105
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 105
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 105
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 105
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100	Presentase Pemberdayaan Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1	Presentase perlindungan sosial bagi korban bencana: 1
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan: 100	Presentase layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100	Presentase perlindungan dan jaminan sosial: 100
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 97	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG: 103
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar: 105
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 105
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 95	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar: 105
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Perumahan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pantl	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pantl	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantl	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantl	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100	Presentase Rehabilitasi Sosial: 100
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	N/A	N/A
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Presentase tatakelola taman makam pahlawan: 100	Presentase tatakelola taman makam pahlawan: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Presentase tatakelola taman makam pahlawan: 100	Presentase tatakelola taman makam pahlawan: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 100	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 99,99
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 100	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 99,99
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 100	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan: 94,73
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 100	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 99,99

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitas inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 100	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitas inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 99,99
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitas inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 100	Persentase rekomendasi hasil riset serta fasilitas inovasi dan teknologi yang dihasilkan: 99,99
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 100	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas: 97,82
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya: 100	66,11%
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	X.XX.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	X.XX.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	X.XX.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	X.XX.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	X.XX.01.1.13.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	X.XX.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemerintahan Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Pen

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600 ton	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36 %
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Produksi Perikanan Budidaya: 1.749.600	Produksi Perikanan Budidaya: 72,36
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR: 70.00
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR: 70.00
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR: 70.00
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR: 70.00
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	N/A	N/A

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah: 100
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 100	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 121,57
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 85%	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 109,52%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 85%	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 109,52%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 85%	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 109,52%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 85%	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 109,52%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 85%	Meningkatnya Pelayanan Penghubung: 109,52%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	X.XX.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%

Kode OPD	Nama OPD	Kode Program	Nama Program	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Prioritas Nasional	Target	Capaian
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 85%	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: 104,74%

Sumber : 1. Rekap Prioritas Nasional Penetapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (SIPD)
2. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025



Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kepala Bidang R&DA	
Analis Kebijakan Ahli Muda	